

DARTAR PUSTAKA

Literatur:

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Zainudin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. Ke-4. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Pustaka Perkara Pidana Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2008. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Grasindo.
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga. Bandung: Citra Aditya.
- _____. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ashidiqqie, Jimly dan M ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, ctk. Kedua, Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Sistem Peradilan Pidana ; Perspektif Eksistensialisme dan bilisionisme*. Bandung: Rineka Cipta.
- Eddyono, Supriyadi Widodo. 2007, \. *Catatan Kritis Terhadap Undang-Undang No 13 tahun 2006, tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta: Elsam.
- Fuady, Munir. 2000, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung, Citra Adtya Bakti;
- _____. 2006. *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*. Bandung: Citra Aditya.
- Giting, Philemon. 2008. *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana*, Tesis. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gunarto, Marcus Priyo. 2011. *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*. Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

- Hastuti, Luthfiah Trini. 2007. *Studi tentang Wacana Hukum Responsif dalam Politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Tesis, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta;
- Idayanti, Soesi. 2020. *Sosiologi Hukum*,. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Indonesia, Mahkamah Agung. 2019. *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*. Mahkamah Agung;
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Meolong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosdakarya.
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nasional, Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Balai Pustaka.
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, 2007, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law, Terjemah Raisul Muttaqien, Hukum Responsif*, Cetakan Pertama Bandung, Nusamedia;
- Putra, Muhammad Hafizh Yamanda. 2019. *Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian dalam Terjadinya Salah Tangkap (Error in Pesona)*. Palembang: Skripsi Universitas Sriwijaya.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Mitos dan Implikasi Globalisasi: Catatan Untuk Bidang Ekonomi dan Keuangan*, pengantar edisi Indonesia dalam Hirst, Paul dan Grahame Thomson, *Globalisasi Adalah Mitos*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Rahardjo, Satipto. Tt. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Reksodiputro, Mardjono. 2007. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan) dalam buku Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.
- RI, Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894 (2019) Pasal 1 ayat (7).

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu. Jakarta: Rajawali Press.

Sasangka, Hari dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju;

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

Supriyadi. 2016. *Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan*,. Jakarta: Lentera Pustaka 2.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2007, *Teori Hukum;Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Surabaya: CV.Kita Surabaya.

Tobing, Raida L, dkk, 2011, *Efektivitas Undang-Undang Monrey Laundering*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Jurnal

Ahmadi, “Kontroversi Penerapan Hukum: Telaah Sintesa Hukum Represif, Hukum Otonom dan Hukum Responsif”, *Jurnal Al-‘Adl*, Edisi No. 1 Vol. 9, Januari 2016.

Aidi, Zil, “Implementasi Ecourt dalam Mewujudkan Penyelesaian Perkata Perdata yang Efektif dan Efisien”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49, No. 1, Januari 2020.

Arianto, Henry, “Hukum Responsif dan Penegakan Hukum di Indonesia”, *Lex Jurnalica*, Edisi No. 2 Vol. 7, April 2017.

Ma’u, Dahlia Haliah dan Muliadi Nur, “Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Hukum dari Realitas Publik)”, *Jurnal Ilmiah Al Syir’ah*, Vol 7, No 2, 2016.

Muchtar, Henni, “Paradigma Hukum Responsif: Suatu Kajian tentang Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Hukum”, *Humanus*, Edisi No. 2 Vol. XI, 2012.

Samekto, FX. Adji, “Relasi Hukum Dengan Kekuasaan: Melihat Hukum dalam Perspektif Realitas”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 13, Januari 2013.

Santoso, Eddy, Sri Endah Wahyuningsih, dan Umar Ma’ruf, “Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. No. 1 Maret 2018.

Simanjuntak, Yoan Nursari, “Hukum Responsif: Interrekasi Hukum dan Dunia Sosial”, *Jurnal Yustika*, Edisi No. 1 Vol. 8, Juli 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Perjanjian Kerjasama Antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,” Pub. L. No. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 894;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Publikasi Online

Indonesia, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara Indonesia. http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

Indonesia, Persatuan Jaksa, 2020, *Selama Pandemi Covid,Kejaksaan Gelar Sidang 388.075 Kali Secara Virtual*, 73.284 Perkara Telah Diput, diakses di [http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1163#:~:text=%E2%80%9CAhmadulillah%2C%20hingga%20saat%20ini%20persidangan,diputus%20atau%20diselesaikan%20secara%20online](http://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1163#:~:text=%E2%80%9CAhmadulillah%2C%20hingga%20saat%20ini%20persidangan,diputus%20atau%20diselesaikan%20secara%20online;);

Ria, Novi Dwi. *Tinjauan Pustaka tentang Penegakan Hukum*, diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/37704/3/jiptummpp-gdl-novidwiria-47951-3-babii.pdf> tanggal 28 Agustus 2021.

